

ABSTRAK

PT. Pelayanan Listrik Negara (Persero) merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam bidang ketenagalistrikan. PT.PLN (Persero) di Indonesia kehadirannya sangat penting, karena tenaga listrik dijadikan sebagai sumber daya yang paling utama dalam kegiatan usaha, rumah tangga, komunikasi, dan tempat lainnya. Kerugian yang dialami konsumen dalam berlangganan listrik marak terjadi. Salah satu contoh kerugian yang dialami konsumen adalah ketika pihak PT.PLN (Persero) mengalami gangguan atau kerusakan yang mengharuskan untuk melakukan pemadaman listrik secara tiba-tiba. Pihak konsumen dirugikan dalam berbagai macam bentuk. Permasalahan yang akan dibahas adalah mengenai pertanggungjawaban yang diberikan PT.PLN (Persero) kepada konsumen yang dirugikan dan upaya yang dapat dilakukan oleh konsumen yang dirugikan akibat pemadaman listrik.

Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini metode penelitian hukum yuridis normatif dan yuridis empiris, dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan cara memadukan bahan hukum sekunder dengan data primer yang diperoleh dari lapangan yaitu tentang sebab dan akibat pemadaman listrik. Spesifikasi penulisan dalam skripsi ini adalah deskriptif analitis yaitu meneliti data sekunder dan memadukannya dengan data primer yaitu penelitian lapangan berupa wawancara kepada pihak Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), pihak industri, garmen, perhotelan, dan restoran kota Bandung dalam menangani dan menyelesaikan kasus pemadaman listrik. Kasus tersebut dianalisis secara yuridis kualitatif.

Hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban dari pihak PT.PLN (Persero) berupa pengurangan tagihan listrik. Kompensasi tersebut tidak sebanding dengan kerugian yang diderita oleh pihak konsumen baik materil maupun secara formil. Upaya yang dapat dilakukan konsumen yang dirugikan dalam kasus tersebut dapat melalui dua tahap. Tahap pertama kedua belah pihak dapat menyelesaikannya diluar pengadilan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Tahap ini dapat dilaksanakan melalui mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Jika dalam tahap ini belum menemukan titik terang maka para pihak dapat melanjutkannya kedalam pengadilan.

ABSTRACT

PT. The State Electricity Service (Persero) is one of the State-Owned Enterprises (SOEs) which is engaged in electricity. PT.PLN (Persero) presence in Indonesia is very important, because electricity is used as the most important resource in business activities, household, communication, and other places. The consumer's share of electricity subscriptions was terrible. One example of losses suffered by consumers is when the PT. PLN (Persero) experienced a disruption or damage that requires a sudden power outage. Consumers are disadvantaged in various forms. The problem to be discussed is the accountability given by PT. PLN (Persero) to consumers who are disadvantaged and efforts that can be done by consumers who are disadvantaged due to power outages.

The method approach used by the researcher in the preparation of this thesis is a normative legal and empirical legal research method, with the aim of finding out and analyzing the problems carried out by combining secondary legal materials with primary data obtained from the field, namely about the causes and consequences of electricity blackouts. The writing specifications in this thesis are analytical descriptive, namely examining secondary data and combining them with primary data, namely field research in the form of interviews with the Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK), industry, garment, hospitality, and restaurants in the city of Bandung in handling and resolving power outage cases. The case in this study is analyzed qualitatively.

The results of this study show that the accountability of PT PLN (Persero) is in the form of reducing electricity bills. This compensation is not proportional to the losses suffered by consumers both materially and formally. Efforts that can be made by consumers who are disadvantaged in this case can go through two stages. The first stage, both parties can settle it out of court through the Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK). This stage can be carried out through mediation, conciliation, and arbitration. If in this stage they have not found a light, then the parties can proceed to court.